



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Rabu 23 April 2025



RINGKASAN BERTA HARI INI

Hearing Komisi A DPRD, Terungkap Fakta Proses Jual Beli Tanah di Desa Sidokerto, Buduran

Iswin Arizal - Rabu, 23 April 2025 | 06:25 WIB



LIGA 2: Deltras saat bermain di Stadion Gelora Delta.

Deltamania Jembatani Masalah Home Base Deltras

KOTA-Rencana manajemen Deltras Sidoarjo yang mempertimbangkan pemindahan home base ke luar kota mendapat perhatian serius dari kelompok supporter Deltamania. Rencana yang secercer ini mendapat tanggapan positif dari kelompok supporter Deltamania. Rencana pemindahan home base ke luar kota mendapat perhatian serius dari kelompok supporter Deltamania. Rencana pemindahan home base ke luar kota mendapat perhatian serius dari kelompok supporter Deltamania.

stadium," jelasnya. Langkah ini merupakan inisiatif mandiri dari para supporter sebagai wujud kepedulian terhadap tim kebanggaan mereka, The Lobster. "Kami akan bergerak terlebih dahulu," tegas pria yang akrab disapa Yoek itu. Meskipun belum menentukan jadwal pertemuan secara pasti, Yoek menegaskan bahwa upaya komunikasi ini akan segera dilakukan dalam waktu dekat sebagai bentuk keseriusan agar Deltras tetap bermain di kandang sendiri. (sai/vga)

Satu Tahun di Kursi Roda, Supardi Dapat Perhatian Khusus dari Bupati



EMPATI: Bupati Sidoarjo Subandi saat mengunjungi Supardi di Desa Temu, RT 4 RW 1, Kecamatan Prambon.

PRAMBON-Tangis haru menyambut kedatangan Bupati Sidoarjo Subandi saat mengunjungi Supardi, 60, Selasa (22/4). Ruhnya yang secercer hana itu berada di Desa Temu, RT 4 RW 1, Kecamatan Prambon. Supardi telah satu tahun terakhir menderita stroke dan hanya bisa duduk di atas kursi roda, ditemani istrinya yang setia merawat. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan bantuan sosial, bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sidoarjo.

Selain memberikan semangat kepada Supardi, Bupati Subandi juga memastikan bantuan perbaikan rumah dan makan harian, dapat segera terealisasi. "Alhamdulillah, BPJS-nya sudah tercover oleh Dinas Sosial. Kami akan bantu atap rumah yang sudah lapuk dan membangun kamar mandi karena sebelumnya belum ada," ujar Subandi. Bupati juga menyampaikan bahwa pihak desa akan mengusulkan Supardi untuk menerima bantuan rutin dari Baznas berupa santunan duaif sebesar Rp 600 ribu per bulan.

Sementara itu, Ketua Baznas Sidoarjo melaporkan bahwa hingga April 2024, sebanyak 224 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) telah berhasil direnovasi melalui program bedah rumah. Angka ini mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun 2023 yang tercatat sebanyak 128 unit. Upaya ini menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah, Baznas, dan masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang lebih layak dan bermartabat bagi warga Sidoarjo. (sai/vga)

PT TJIWI KIMIA KOMITMEN TIDAK AKAN PHK KARYAWAN



Halal Bihalal... PT Tjiwi Kimia Komitmen Tidak Akan PHK Karyawan. Kami percaya, awal melakukan program bisnis bisa dimulai dari berita yang tidak bertanggung jawab. Maka penting bagi kita untuk terus menjaga silaturahmi dan membangun komunikasi yang sehat. PT Tjiwi Kimia Komitmen Tidak Akan PHK Karyawan. Kami percaya, awal melakukan program bisnis bisa dimulai dari berita yang tidak bertanggung jawab. Maka penting bagi kita untuk terus menjaga silaturahmi dan membangun komunikasi yang sehat.

Diduga Dikerjakan Kontraktor Sontoloyo Proyek Dua Pemeliharaan Jalan Salam-Sumberejo-Urangagung Lepas Pantauan Publik

Sidoarjo, Pojok Kiri... Seperti diberitakan di harian Pojok Kiri sebelumnya, proyek pemeliharaan dua ruas jalan Salam-Sumberejo-Urangagung yang bersumber dari dana APBD Sidoarjo tahun anggaran 2025 mendapat tanggapan memble baik dari dinas PUBMDSA Sidoarjo. Yali sebagai perencanaan proyek, ia menanggapi enteng terkait kasus proyek tambal sulam.



Ucapnya saat di di WhatsApp oleh Solik ketua LSM Aliansi Masyarakat Perangi Korupsi. Sedangkan kedua proyek PL bernilai 199 juta perken proyek ini lepas dari pantauan publik mengingat pekerjaan tambal sulam yang terkesan acak acakan tidak ditanggapi pada publik sebagai unsur keterbukaan informasi publik sebagai syarat transparansi pada publik sesuai dengan kaidah UU Informasi Keterbukaan Publik tahun 2008 no 14. Perihal ini ditanggapi oleh ketua LSM Aliansi Masyarakat Perangi Korupsi, Solik saat dikonfirmasi wartawan, Rabu 16/4/25 terkait pekerjaan proyek PL Tambal Sulam pemeliharaan ruas jalan Salam-Sumberejo yang dikerjakan CV Firmam tanpa memasang papan nama padahal proyek sudah selesai 10 hari yang lalu. Solik menandas pada wartawan, ia akan Puldata dan Pulbakat dan jika pada proyek ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang diduga dua alat bukti secara hukum, ia akan laporan ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo maupun ke Polresta Sidoarjo mengingat untuk mendapatkan proyek PL pemeliharaan tambal sulam yang terkesan acak acakan tidak merata banyak ruas yang sudah rusak pecah tidak ditambah sulam terlewat dan tambal sulam amat tipis sekali, Kritisnya pada wartawan, Rabu, 16/4/25. Ia memprediksi umur tambal sulam tak bertahan lama mungkin seumur j agung Katanya yang juga diyakin oleh Budi warga asli Suko. Sedangkan Kabid Pemeliharaan Jalan, Ir Prayit saat dicoba lagi dikonfirmasi via WhatsApp, Selasa 22/4/25 saat ditanya apa sanksi kontraktor yang mengerjakan proyek ambudul, ia jawab tergantung pak Rizal Assan, Katanya. Sebelumnya ia bungkam seribu bahasa terkait proyek PL Pemeliharaan Ruas jalan Salam-Suko Urangagung yang terkesan acak acakan tidak memenuhi spesifikasi teknis, begitu pula dengan Ir Rizal Kabid jalan PUBMDSA, HP nya zonk memblokir no Kabiro HR Pojok Kiri Sidoarjo, H Abdul Khloif (Khol/Bersambung)

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan Sekretariat DPRD Sidoarjo

MALANG-SIDOARJO-GRESIK

DUTA MASYARAKAT
RABU, 23 APRIL 2025

Setahun Lumpuh, Supardi Haru Terima Bantuan Rumah

Juga Santunan dari Pemkab

SIDOARJO - Momen haru tak terelakan, saat Supardi (60), warga Desa Temu RT 4 RW 1, Kecamatan Prambon, tak kuasa menahan air mata saat kedatangan Bupati Sidoarjo, H. Subandi, di kediamannya.

Sudah satu tahun terakhir, Supardi hanya bisa duduk di atas kursi roda akibat serangan stroke. Ia ditemani sang istri yang setia merawatnya setiap hari.

Kunjungan Bupati Subandi pada Selasa (22/4/25) itu membawa harapan baru bagi Supardi. Melalui program bantuan dari Baznas Sidoarjo, rumah Supardi akan segera diperbaiki, terutama bagian atap yang mulai rapuh dimakan rayap. Selain itu, kamar mandi yang sebelumnya belum tersedia juga akan segera dibangun.

"Alhamdulillah, kalau BPJS-nya sudah tercover oleh Dinas Sosial," ujar Bupati Subandi sambil memberikan semangat kepada Supardi. Tak hanya perbaikan fisik ru-

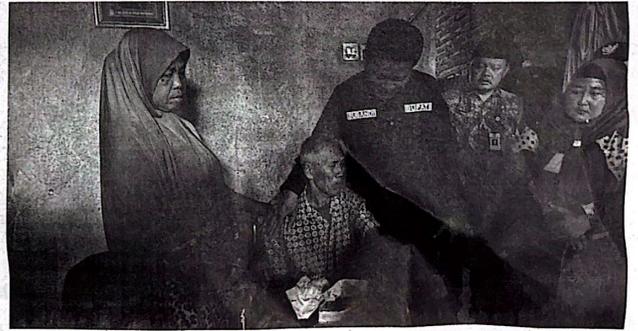
mah, Pemkab juga mengupayakan bantuan konsumsi harian. Bupati meminta pihak desa untuk mengusulkan Supardi sebagai penerima bantuan makanan diuafa dari Baznas, dengan nilai bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan.

"Ini bagian dari ikhtiar kita untuk memastikan warga yang tidak mampu tetap mendapat perhatian dan bantuan," tambah Subandi.

Terima Kasih ASN dan Guru Bupati Subandi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan guru di lingkungan Pemkab Sidoarjo yang telah ikut berkontribusi melalui pemotongan infak secara rutin ke Baznas.

"Dengan adanya Baznas, kita bisa bergerak cepat untuk membantu masyarakat," ujarnya.

Baznas Sidoarjo terus menjalankan berbagai program sosial seperti bedah rumah tidak layak huni. Sepanjang tahun 2024, Ba-



Supardi warga Prambon menangis haru saat didatangi Bupati Subandi di kediamannya Selasa (22/4/25)

znas telah berhasil merenovasi sebanyak 224 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)—naik signifikan dari 128 unit pada tahun 2023.

Bupati Subandi yang akrab disapa Abah Bandi juga mendorong

Baznas untuk menggandeng lebih banyak perusahaan swasta agar penyaluran bantuan bisa lebih cepat dan luas jangkauannya.

"Saya yakin, dengan uluran tangan pemerintah dan dunia usaha, kita bisa mempercepat bantuan

bagi masyarakat yang membutuhkan," pungkasnya.

Terimakasih untuk Bapak Bupati dan semuanya, terima kasih sambil meneteskan air mata tak dapat bicara banyak," ucap Supardi sambil meneteskan air mata. • Loe

DUTA



DOK/DUTA

Danpuspenerbal Laksda TNI Sisyani Jaffar, menerima kunjungan courtesy call dari Bupati Sidoarjo, H. Subandi, di Base Ops Lanudal Juanda.

TNI AL dan Pemkab Perkuat Kolaborasi untuk Kemajuan Bersama

SIDOARJO - Dalam rangka memperkuat silaturahmi serta kerja sama antar instansi, Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut (Danpuspenerbal), Laksda TNI Sisyani Jaffar, menerima kunjungan courtesy call dari Bupati Sidoarjo, H. Subandi, di Base Ops Lanudal Juanda, Senin sore, (21/4/25).

Pertemuan yang berlangsung penuh keakraban ini menjadi momentum penting dalam mempertegas sinergi antara TNI AL dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Bupati Sidoarjo, H. Subandi, didampingi sejumlah pejabat daerah seperti Kepala Bakesbangpol Sidoarjo Fredik Suharto, Kepala Dinas Perhubungan Benny Airlangga Yogaswara, dan Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sabino Mariano.

Kunjungan ini bertujuan utama untuk memperkenalkan diri sebagai pemimpin baru Kabupaten Sidoarjo kepada Danpuspenerbal beserta jajaran, sekaligus memperkuat hubungan baik yang telah terjalin selama ini antara Pemkab

Sidoarjo dan TNI AL.

"Kami berharap sinergi yang sudah terbangun dengan baik ini dapat terus terjalin dan ditingkatkan demi kemajuan bersama, khususnya Kabupaten Sidoarjo," ujar Subandi.

Kolaborasi antara TNI AL dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga diharapkan menjadi contoh sinergi yang efektif antara instansi pemerintah pusat dan daerah. Dengan komunikasi yang intens dan saling mendukung, program-program pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

"Kami siap mendukung program-program TNI AL demi kemajuan pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang lebih baik. Kolaborasi dan komunikasi adalah kunci sukses dalam mewujudkan pembangunan di Sidoarjo ke depan," tambahnya.

Danpuspenerbal Laksda TNI Sisyani Jaffar menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menegaskan komitmen TNI AL untuk terus

menjaga kolaborasi erat dengan Pemkab Sidoarjo. Menurutnya, keberadaan Markas Komando Puspenerbal, Pangkalan TNI AL, serta objek vital nasional Bandara Internasional Juanda di wilayah Sidoarjo merupakan faktor strategis yang membutuhkan dukungan bersama.

"Keberadaan kami di Sidoarjo adalah tanggung jawab besar. Oleh karena itu, sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara optimal di masa mendatang," tegasnya.

Turut hadir mendampingi Danpuspenerbal dalam pertemuan ini antara lain Wakil Komandan Puspenerbal Laksma TNI Bayu Alisyahbana, Inspektur Puspenerbal, para Direktur Puspenerbal, Komandan Lanudal Juanda, Komandan Wing Udara 2 Puspenerbal, serta Komandan Kolat Penerbal. Kehadiran mereka menunjukkan keseriusan TNI AL dalam membangun komunikasi dan kerja sama lintas sektor. ● Loe

PT TJIWI KIMIA KOMITMEN TIDAK AKAN PHK KARYAWAN



Sidoarjo, Pojok Kiri,-

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan media massa. Kolaborasi yang positif akan membawa manfaat besar, baik bagi dunia usaha maupun masyarakat luas.

Hal ini disampaikan oleh Public Affair and License Manager PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, Beny Haryawan saat Halal Bihalal bersama ratusan insan media yang bertugas di Sidoarjo dan Mojokerto, Senin (21/4/2025).

Beny mengapresiasi sinergi yang telah terjalin antara PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dan media massa selama ini.

Menurutnya, kolaborasi yang positif akan membawa manfaat besar, baik bagi dunia usaha maupun masyarakat luas.

"Kami percaya, awal kehancuran bangsa maupun bisnis bisa dimulai dari berita yang tidak bertanggung jawab. Maka penting bagi kita untuk terus menjaga silaturahmi dan membangun komunikasi yang sehat," tandasnya.

Beny menambahkan, dunia saat ini semakin terbuka, semakin tidak ada batas. "Kejadian di tempat kita hari ini, bisa langsung diketahui oleh seluruh dunia. Ini menunjukkan betapa penting dan kuatnya peran media dalam membawa perubahan," jlentreh Beny.

Selain menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan media massa, Beny juga memaparkan sekilas kondisi perusahaan dan kebijakan strategisnya berkaitan dengan dampak ekonomi global.

Diantaranya komitmen

perusahaan untuk tidak melakukan pengurangan karyawan melalui pemutusan hubungan kerja (PHK).

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, lebih memilih untuk melakukan penyesuaian strategi dan efisiensi operasional untuk menghadapi tantangan ekonomi saat ini.

"Kami memahami bahwa krisis ekonomi global dapat berdampak pada operasional perusahaan. Namun kami berkomitmen untuk tidak melakukan PHK dan lebih fokus pada penyesuaian strategi dan efisiensi operasional," tandas Beny saat sesi diskusi dalam acara Halal Bihalal tersebut.

Beny mengatakan, perusahaan ini telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional, seperti mengoptimalkan penggunaan sumber daya

manusia dan meningkatkan produktivitas.

"Kami tetap fokus dalam pengembangan dan terobosan pasar untuk tetap konsisten dalam memenuhi permintaan pasar," ungkap Beny.

Halal Bihalal dengan insan media yang diselingi dengan pembagian door-prize ini, merupakan agenda rutin setiap tahun yang digelar PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.

Tahun 2025 ini, Halal Bihalal bertema "Mengukuhkan Persaudaraan di Tengah Perubahan untuk Masa Depan yang Harmonis dan Terbuka".

Halal Bihalal diikuti ratusan wartawan media cetak, televisi, dan media online yang tergabung dalam

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sidoarjo, PWI Mojokerto, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia

(JTI) Sidoarjo, JTI Mojokerto, dan Forum Wartawan Sidoarjo (Forwas).

Sementara itu, Ketua PWI Sidoarjo, Mustain mengapresiasi komitmen PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk untuk terus bersinergi dengan media massa atau media pers tanpa ditutupi.

"Kami apresiasi positif untuk Tjiwi Kimia yang komitmen terus bersinergi dengan media massa di tengah arus deras informasi saat ini," tandasnya.

Kata Mustain, dengan berkolaborasi dengan media massa atau media pers, perusahaan diantaranya bisa mengurangi risiko terkait berita palsu. "Media massa menerapkan proses verifikasi yang ketat, sehingga ini bisa mengurangi risiko perusahaan terkait dengan misinformasi," pungkas Mustain. (Khol/ADV)

Diduga Dikerjakan Kontraktor Sontoloyo Proyek Dua Pemeliharaan Jalan Salam- Sumberejo-Urangagung Lepas Pantauan Publik

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Seperti diberitakan di harian Pojok Kiri sebelumnya dugaan ngawur tabrak aturan, Proyek PL (Penunjukan Langsung) Pemeliharaan dua ruas jalan Salam Suko Sumberejo dan Urangagung yang bersumber dari dana APBD Sidoarjo tahun anggaran 2025 mendapat tanggapan memble baik dari dinas PUBBMSDA Sidoarjo, Yuli sebagai perencanaan proyek, ia menanggapi enteng terkait kasus proyek tambal sulam, ia hanya sebagai perencanaan saja tidak ikut mengawasi proyek katanya saat ditemui wartawan, Kamis, 17/4/25, ia akan sampaikan ke Ir Rizal Adnan Kabid jalan Katanya, namun zonk tidak ada realita.

Sedangkan kemarin Kabiro HR Pojok Kiri investigasi langsung di lokasi proyek, Senin 21/4/25 belum tampak ada perbaikan sesuai harapan masyarakat sekitar, jalan yang retak tidak kunjung ditambal sulam dibiarkan saja begitu pula papan nama sebagai unsur keterbukaan informasi publik tidak dipasang. Sedangkan Firman yang diduga kontraktor Sontoloyo juga menanggapi datar terimakasih info nya atas diexpose pekerjaan saya di koran Harian Pojok Kiri,



Ucapnya saat di di WhatsApp oleh Solik ketua LSM Aliansi Masyarakat Perangi Korupsi.

Sedangkan Kedua proyek PL bernilai 199 juta per item proyek itu lepas dari pantauan publik mengingat pekerjaan tambal sulam yang terkesan acak acakan tidak dilengkapi papan nama sebagai unsur keterbukaan informasi publik sebagai syarat transparansi pada publik sesuai dengan kaidah UU Informasi Keterbukaan Publik tahun 2008 no 14.

Perihal ini ditegaskan oleh ketua LSM Aliansi Masyarakat Perangi Korupsi, Solik saat dikonfirmasi wartawan, Rabu 16/4/25 terkait pekerjaan proyek PL Tambal Sulam pemeliharaan ruas jalan Salam Suko-Sum-

berejo yang dikerjakan CV Firman tanpa memasang papan nama padahal proyek sudah selesai 10 hari yang lalu.

Solik menandas pada wartawan, ia akan Puldata dan Pulbaket dan jika pada proyek ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang didukung dua alat bukti secara hukum, ia akan laporkan ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo maupun ke Polresta Sidoarjo mengingat untuk mendapatkan proyek PL terindikasi kental nuansa KKN, Tandas Solik pada wartawan.

Sedangkan Firman kontraktor pelaksana saat dikonfirmasi wartawan di Kantin PUBBMSDA Sidoarjo akan pekerjaannya ia menantang wartawan untuk investigasi

di lokasi proyek, jawab ia silakan sidak investigasi ke lokasi, Katanya. Sementara Kades Suko, H Sabari saat dikonfirmasi wartawan terkait proyek PL pemeliharaan jalan di wilayahnya, ia tidak tahu menahu karena ia tidak diberitahu baik dari dinas PUBBMSDA maupun dari kontraktor pelaksana, Ucapnya pada wartawan, Selasa 15/4/24. Lain halnya dengan Hadi warga sekitar Salam Suko Urangagung, ia mengkritik pekerjaan pemeliharaan tambal sulam yang terkesan acak acakan tidak merata banyak ruas yang sudah retak pecah tidak ditambal sulam terlewat dan tambal salamnya amat tipis sekali, Kritiknya pada wartawan, Rabu, 16/4/25.

Ia memprediksi umur

tambal sulam tak bertahan lama mungkin seumur jagung Katanya yang juga diyakan oleh Budi warga asli Suko. Sedangkan Kabid Pemeliharaan Jalan, Ir. Prayit saat dicoba lagi dikonfirmasi wartawan via WhatsApp, Selasa 22/4/25 saat ditanya apa sanksi kontraktor yang kerjakan proyek amburadul, ia jawab tergantung pak Rizal Asnan, Katanya.

Sebelumnya ia bungkam seribu bahasa terkait proyek PL Pemeliharaan Ruas jalan Salam Suko Urangagung yang terkesan acak acakan tidak memenuhi spesifikasi teknis, begitu pula dengan Ir. Rizal Kabid jalan PUBBMSDA, HP nya zonk memblokir no Kabiro HR Pojok Kiri Sidoarjo, H Abdul Kholiq. (Khol/Bersambung)

...sasi terbakar di tol Sidoarjo arah Waru, Selasa (22/4). Petugas PJR Jatim 2 melakukan evakuasi kendaraan.



LIGA 2: Deltras saat bermain di Stadion Gelora Delta.

Deltamania Jembatani Masalah Home Base Deltras

KOTA-Rencana manajemen Deltras Sidoarjo yang mempertimbangkan pemindahan home base ke luar kota mendapat perhatian serius dari kelompok supporter Deltamania. Rencana tersebut muncul sebagai respons atas tingginya tarif retribusi penggunaan Stadion Gelora Delta Sidoarjo (GDS).

Sekretaris Deltamania, Satrio Aji Utomo, menyatakan dukungan penuh agar Deltras tetap bermarkas di Sidoarjo. "Kami akan berupaya se-

maksimal mungkin agar hal itu tidak sampai terjadi," ujarnya kepada Radar Sidoarjo, Selasa (22/4).

THE LOBSTER

Satrio menjelaskan bahwa pihaknya tengah menyiapkan langkah komunikasi dengan sejumlah pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan pengelola stadion.

"Kami akan segera menjalin komunikasi untuk membahas persoalan yang menjadi keluhan manajemen, terutama terkait tarif penggunaan

stadion," jelasnya.

Langkah ini merupakan inisiatif mandiri dari para supporter sebagai wujud kepedulian terhadap tim kebanggaan mereka, The Lobster. "Kami akan bergerak terlebih dahulu," tegas pria yang akrab disapa Yoyok itu.

Meskipun belum menentukan jadwal pertemuan secara pasti, Yoyok menegaskan bahwa upaya komunikasi ini akan segera dilakukan dalam waktu dekat sebagai bentuk keseriusan agar Deltras tetap bermain di kandang sendiri. (sai/vga)



Satu Tahun di Kursi Roda, Supardi Dapat Perhatian Khusus dari Bupati



EMPATI: Bupati Sidoarjo Subandi saat mengunjungi Supardi di Desa Temu, RT 4 RW 1, Kecamatan Prambon.

PRAMBON-Tangis haru menyambut kedatangan Bupati Sidoarjo Subandi saat mengunjungi Supardi, 60, Selasa (22/4). Rumahnyanya yang sederhana itu berada di Desa Temu, RT 4 RW 1, Kecamatan Prambon.

Supardi telah satu tahun terakhir menderita stroke dan hanya bisa duduk di atas kursi roda, ditemani istrinya yang setia merawat. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan bantuan sosial, bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baz-

nas) Kabupaten Sidoarjo. Selain memberikan semangat kepada Supardi, Bupati Subandi juga memastikan kebutuhan dasar, termasuk bantuan perbaikan rumah dan makan harian, dapat segera terealisasi.

"Alhamdulillah, BPJS-nya sudah tercover oleh Dinas Sosial. Kami akan bantu atap rumah yang sudah lapuk dan membangun kamar mandi karena sebelumnya belum ada," ujar Subandi.

Bupati juga menyampaikan bahwa pihak desa akan mengusulkan Supardi untuk menerima bantuan rutin dari Baznas berupa san-

tunan duaif sebesar Rp 600 ribu per bulan.

Sementara itu, Ketua Baznas Sidoarjo melaporkan bahwa hingga April 2024, sebanyak 224 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) telah berhasil direnovasi melalui program bedah rumah. Angka ini mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun 2023 yang tercatat sebanyak 128 unit.

Upaya ini menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah, Baznas, dan masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang lebih layak dan bermartabat bagi warga Sidoarjo. (sai/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Disnaker: Laporan PHK Ada, tapi Jumlahnya Kecil

ISU Keputusan Hubungan Kerja (PHK) secara nasional turut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Namun, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sidoarjo memastikan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Kota Delta masih dalam situasi stabil dan kondusif.

Kepala Disnaker Sidoarjo, Ainun Amalia, mengatakan bahwa laporan terkait PHK memang ada, tetapi jumlahnya masih tergolong kecil.

“Alhamdulillah, hingga saat ini angkanya masih dalam batas wajar,” ujarnya, Selasa (22/4).

Ainun mengaku belum menghitung secara pasti jumlah pekerja terdampak, namun dari laporan yang diterima, jumlahnya masih di bawah sepuluh orang.

“Tidak sampai ratusan, apalagi ribuan. Hanya satu hingga lima kasus, sehingga kami nilai situasinya masih terkendali dan belum masuk kategori darurat PHK,” jelasnya. (sai/vga)

Diperbanyak oleh Subbag Persilangan, Riset dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

KONI Sidoarjo akan Kirim 1.418 Atlet Terbaik ke Porprov IX

Sidoarjo, Bhirawa

Ketua KONI Sidoarjo terpilih, periode 2025-2029, Imam Mukri Affandi, menyatakan pihaknya tidak akan main-main dalam ikut Porprov Jatim ke-IX tahun 2025 di Malang Raya, pada Bulan Juli, sebentar lagi. Dalam pertandingan olah raga antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur itu, KONI Sidoarjo akan mengirim sebanyak 1.418 atlet-atlet terbaiknya. "Target kita adalah mempertahankan posisi runner up, seperti Porprov VIII tahun 2023 lalu," kata Imam, belum lama ini.

Dalam tiga kali Porprov Jatim, prestasi atlet-atlet dari Kabupaten Sidoarjo dinilai terus ada peningkatan. Misalnya pada Porprov ke-VI, posisi Kabupaten Sidoarjo pada urutan ke-VI. Kemudian, pada Porprov Jatim ke-VII, melonjak ke peringkat III, dan pada Porprov Jatim ke-VIII, naik menjadi runner up. "Kita tidak main-main dalam Porprov IX tahun 2025 ini," kata Imam.

Pada Porprov IX nanti, tim dari Sidoarjo akan mengikuti 42 cabang. Para atlet dan pelatih, dimotivasi supaya mampu meraih medali dan poin dengan sebanyak-banyaknya. "Ayo membangun Sidoarjo dalam bidang olah raga. Tidak hanya pada prestasi Provinsi, Nasional, kalau bisa bahkan prestasi internasional," kata Imam, memberi semangat. [kus.wwn]



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Kemen PAN-RB Seleksi Ulang ASN yang Dipindahkan ke IKN

Disesuaikan Perubahan Struktural Kementerian/Lembaga

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) bakal menyeleksi ulang ASN yang dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Seleksi itu disesuaikan dengan strategi pembangunan IKN terbaru serta

perubahan struktural dalam kementerian dan lembaga yang ada di Kabinet Merah Putih. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Rini Widyantini mengatakan, seleksi ASN berjalan setahun. Dimulai tahun ini hingga 2026. "Perlu penyesuaian kembali agar kebijakan pemindahan sejalan dengan perubahan struktur organisasi dan prioritas strategis pemerintahan ke depan,"

jelasnya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Otorita IKN, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Kompleks DPR/MPR kemarin (22/4). Pemindahan ASN ke IKN, kata Rini, dilaksanakan secara bertahap. Pada fase pertama, prioritasnya adalah pegawai yang bertugas di unit strategis pendukung penyelenggaraan pemerintahan. Disusul ASN dari hasil seleksi CPNS 2024. Di dalamnya,



Rini Widyantini

termasuk pegawai yang masuk kuota afirmasi. Pada fase ini, pengisian ASN bersamaan dengan dimulainya mutasi aparat dari pemerintah daerah Kalimantan Timur (Kaltim). Sementara, untuk fase ketiga, akan berfokus pada implementasi sistem smart government, baik di IKN maupun di Jakarta.

BKN Belum Dapat Data Kepala Badan Kepegawaian

Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan, untuk memudahkan pemindahan, pihaknya telah menyiapkan Layanan ASN Pindah ke IKN pada platform ASN Digital. Fungsinya memproses kepindahan pegawai mulai dari pengusulan masing-masing instansi sampai ASN masuk pada Kawasan IKN. "Sampai saat ini, kami belum mendapatkan data pegawai

untuk diverifikasi dan divalidasi dalam rangka penempatan," ungkapnya. Rencana pemindahan ASN ke IKN sudah dirancang sejak tahun lalu. Namun, berulang kali mengalami penundaan. Hingga akhirnya pada Januari 2025, Men PAN-RB mengeluarkan surat penundaan pemindahan ASN ke IKN secara resmi sampai batas waktu yang belum bisa dipastikan. (mia/aph)

CS Scanned with CamScanner

Jawa Pos

KEMENTERIAN AGAMA

Kucurkan Rp 6,4 M untuk Badan Wakaf di Daerah

JAKARTA - Penghimpunan wakaf produktif di Indonesia masih belum optimal. Padahal potensinya mencapai Rp 180 triliun tiap tahun. Kementerian Agama (Kemendagri) berupaya mempercepat penghimpunan wakaf produktif. Diantaranya dengan mengucurkan bantuan Rp 6,4 miliar lebih untuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) di daerah-daerah.

Bantuan yang diberikan adalah Rp 100 juta untuk 34 BWI tingkat provinsi sehingga total Rp 3,4 miliar. Kemudian bantuan masing-masing Rp 30 juta untuk 100 BWI tingkat kabupaten/kota atau senilai Rp 3 miliar.



POTENSI BESAR: Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag Waryono Abdul Ghofur (dua dari kanan) dalam peresmian penyaluran bantuan untuk BWI daerah pada Senin malam lalu (21/4).

Total bantuan yang dikucurkan sebanyak Rp 6,4 miliar. Bantuan untuk akselerasi wakaf produktif itu disalurkan dengan bentuk bantuan. Pembiayaan Perwakilan Badan

Wakaf Indonesia. Peluncuran dilaksanakan di Jakarta pada Senin (21/4) malam. Program ini bertujuan mendukung pengujian kelambatan wakaf di daerah, sekaligus

memperkuat tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan wakaf secara nasional. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag Waryono Abdul Ghafur

mengatakan, bantuan itu didasarkan pada Pasal 52 Peraturan Pemerintah (PP) 42/2006 dan perubahan dalam PP 25/2018 tentang Pelaksanaan UU 41/2004 tentang Wakaf. Di dalamnya diatur bahwa BWI berhak memperoleh pembiayaan melalui anggaran Kemenag. Dia juga mengatakan bahwa dukungan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem wakaf nasional. "BWI daerah adalah ujung tombak pengembangan wakaf di Indonesia," kata Waryono dalam keterangannya

Selasa (22/4). Bantuan itu bukan sekadar dana operasional. Tetapi bentuk kepercayaan dan investasi dalam tata kelola wakaf yang lebih baik. Untuk mendapatkan bantuan itu, perwakilan BWI wajib menyiapkan sejumlah dokumen. Seperti laporan kinerja tahun 2024, rencana anggaran dan kegiatan tahun 2025, serta dokumen administratif lainnya. Seluruh proses dilakukan secara daring melalui Sistem Informasi Wakaf (Siwak) milik Kemenag. Waryono menyatakan, verifikasi dan validasi akan dilakukan oleh tim Kemenag. Proses pencairan

ASET TANAH WAKAF DI JAWA DAN BALI	
1	Jawa Timur (78.825 bidang)
2	Jawa Tengah (5.828 hektar (112.834 bidang))
3	Jogjakarta (417 hektar (11.265 bidang))
4	Jawa Barat (6.513 hektar (87.795 bidang))
5	Jakarta (273 hektar (6.785 bidang))
6	Banten (1.951 hektar (17.139 bidang))
7	Bali (214 hektar (1.498 bidang))
Total di Indonesia : 57.263 Hektar (440.512 bidang)	
* Wakaf di Indonesia Masih Didominasi Aset Tanah	

Sumber: Kementerian Agama
GABRIEL WILHELMUS/JAWA POS
bantuan dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara perwakilan BWI dan Kemenag. (wan/ali)

CS Scanned with CamScanner

Jawa Pos

Normalisasi Afvour Bono Pepelegi Dilakukan Bertahap

SIDOARJO - Normalisasi Sungai Afvour Bono di Pepelegi, Waru, mulai dikerjakan. Alat berat sudah bisa masuk area sungai sejak akhir pekan lalu.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBM-SDA) Sidoarjo Dwi Eko Saptono mengatakan bahwa normalisasi Afvour Bono sudah dimulai sejak Minggu (20/4). "Alat berat sudah bisa masuk ke sungai, Tapi baru di sisi depan Lotte Mart saja yang dikeruk karena yang ada aksesnya," ujarnya kemarin (22/4).

Untuk berpindah ke sisi

lainnya, perlu adanya akses bagi alat berat untuk berpindah. Sehingga pembongkaran PKL di pinggir sungai Desa Pepelegi itu, termasuk normalisasinya masih akan dilakukan bertahap.

"Bertahap, agar alat berat bisa lebih leluasa bergerak untuk pekerjaan normalisasi," jelasnya. Dwi menjelaskan bahwa penertiban bangunan liar nantinya juga selalu koordinasi dan rembuk solusi bersama warga. "Koordinasi akan dilakukan. Solusi juga disiapkan agar tidak menimbulkan gejolak di lapangan," jelasnya. (eza/uzi)





ANGGER BONDAN/JAWA POS

ANGKAT SEDIMENTASI: Petugas menggunakan alat berat untuk mengeruk Afur Bono di Jalan Pepelegi, Waru, kemarin (22/4).

CS Scanned with CamScanner

Guru Sidoarjo

Jawa Pos



ANGGER BONDAN/JAWA POS

PERSIAPAN SPMB: Para siswa SD Negeri Keboan Anom usai menjalani sesi pembelajaran kemarin (22/4).

Kuota Murid Baru Jalur Domisili Naik

SIDOARJO - Surat Keputusan (SK) Bupati Sidoarjo terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Sidoarjo resmi ditandatangani Bupati Sidoarjo Subandi.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo Tirto Adi mengatakan, SK Bupati soal SPMB tersebut berisi persentase kuota tiap

Sedangkan tahun ini akan dinaikkan menjadi 75 persen. Kemudian jalur afirmasi dari minimal Permendikdasmen adalah 15 persen, naik menjadi 22 persen. Jalur mutasi lebih kecil dari batas minimal Permendikdasmen dari 5 persen jadi 3 persen.

Kuota SMPN juga mengalami kenaikan dari batas minimal

jenis persentase kuota tiap jalur penerimaan. Termasuk jadwal pelaksanaannya."Sudah ditandatangani, nanti ada penambahan kuota SPMB," katanya kemarin (22/5).

Tirto mengatakan, untuk jenjang SDN, ada kenaikan kuota sekitar lima persen dari batas minimal Permendikdasmen. Jalur domisili SDN, batas minimal kuota 70 persen.

kenaikan dan batas minimal Permendikdasmen. Jalur domisili dengan kuota minimal 40 persen, naik jadi 45 persen. Kemudian afirmasi yang batasnya 20 persen, naik jadi 22 persen.

"Jadi kuota jalur domisili, afirmasi, dan prestasi di SPMB SMPN ada kenaikan, sedangkan untuk SDN, pada jalur domisili dan afirmasi yang naik," ujarnya. (eza/uzi)

enulis

CS Scanned with CamScanner

Jawa Pos

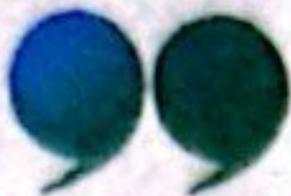


INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Bangunan Liar di Tambak Sumur Akan Dibongkar



Dalam upaya

penertiban dan
normalisasi
saluran air,
Satpol PP
Kecamatan Waru
pekan lalu sudah
menyampaikan
surat peringatan
kepada pedagang
kaki lima (PKL)
dan pemilik
bangunan liar
(bangli) di
wilayah Pondok
Tjandra Indah,
Desa Tambak
Sumur”.

M. NAWARI

*Camat Waru terkait
tahap penertiban
bangunan liar di Desa
Tambak Sumur*

CS Scanned with CamScanner

Jawa Pos

Merasa Dirugikan Direktur PT. KKP Wadul Ke DPRD Sidoarjo



Redaksi 5 Min Baca
22 April 2025



Sidoarjo, Arjunanusantaranews.com, – Merasa dirugikan direktur PT. Kembang Kenongo Properti (PT. KKP) wadul ke DPRD Sidoarjo. Terkait jual beli tanah yang awalnya dikatakan sebagai tanah cullan yang ada di Dusun Klangri Desa Sidokerto Kecamatan Buduran Sidoarjo kini menjadi persoalan hukum. Eko sebagai Direktur PT. Kembang Kenongo Properti (PT. KKP) mencari keadilan dengan mengadu ke DPRD Sidoarjo. Melalui Komisi A yang membidangi hukum dan pemerintahan.

Dalam rapat pertemuan audiensi hari ini, Selasa (22/4/2025) di ruang rapat Paripurna DPRD Sidoarjo, telah hadir Ketua komisi A DPRD Sidoarjo HRizza Ali Faizin bersama anggota komisi A, Rizal Fuady, Bambang Riyoko, Elok Suciati dan Muchammad Rafi Wibisono serta Camat Buduran Suprayitno, Plh. Kades Sidokerto Subagyo dan Sekdes, BPN, Dinas PMD dan BAKD.

Karena merasa dirugikan direktur PT. Kembang Kenongo Properti (PT. KKP) wadul ke DPRD Sidoarjo. Dalam rapat audiensi tersebut telah dipimpin oleh HRizza Ali Faizin sebagai Ketua komisi A DPRD Sidoarjo, dengan mengucapkan terima kasih kepada semua anggota komisi A yang hadir serta undangan atau yang mewakili pada pertemuan hari ini. Dengan begitu rapat telah dibuka dan memberikan ruang pertama kepada Eko sebagai Direktur PT. KKP untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan pada audiensi hari ini.

Merasa dirugikan direktur PT. Kembang Kenongo Properti (PT. KKP) wadul ke DPRD Sidoarjo. Eko menyampaikan bahwa terkait jual beli tanah cuilan seluas 4000 meter persegi lebih dari ahli waris Soleh Hambali yaitu H. Kastain.

Tanah tersebut sudah menjadi sebuah bangunan perumahan. Awal dari pembelian tanah tersebut telah diberi selemba leter C atas nama H. Hambali. Setelah itu diperkuat surat tidak sengketa dari Lurah dan telah disempumakan ke Notaris surat- surat yang dibelinya.

Setelah hampir dua tahun tidak ada masalah atau problem sampai tanah kita bangun. Baru dua tahun ini ada laporan dari salah satu LSM Sidoarjo, bahwa tanah itu dianggap tanah kas desa (TKD). Dan perumahan itu sudah ada yang menempati semua, kami hanya minta bagaimana untuk penjelasan tanah ini, supaya tidak ada perselisihan, keluh Eko.

Andi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) telah menyampaikan bahwa ini masih di proses dipengadilan dan hari rabu besok adalah jawaban yang pertama. Menurut hemat kami tetap kami tunggu proses yang telah berjalan, baik di kejaksan dalam proses penyidikannya maupun dipengadilan.



H.Rizza Ali Faizin ketua Komisi A menyampaikan kepada para awak media bahwa perihal ini dalam proses hukum, jadi sudah kemarin beberapa fakta – fakta yang ada masih dalam proses praperadilan. Dan ini semua pihak kita hadirkan dengan Pemerintah Desa sampai beberapa dinas terkait biar menyampaikan data-data yang ada buat referensi pak Eko dan tim dalam persidangan. Jadi ini buat catatan kita bersama bahwa memang hari ini kondisi dilapangan kadang secara vaktual begitu adanya, tetapi secara administrasi kadang tidak sesuai ini menjadikan hati-hati untuk masyarakat yang investasi di Kabupaten Sidoarjo lebih hati-hati lagi benar-bener dipastikan titik- titik obyek yang akan dibeli biar tidak menjadikan permasalahan hukum.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Terkait dengan nasib lima puluh dua user, tetap kita menunggu karena belum keputusan Pengadilan. Jadi nanti setelah putusan pengadilan baru kita pikirkan bersama. Karena kita ngawal kasus ini, dan ini baru diketahui semua dokumen-dokumen tadi tidak ada yang menyertakan bahwa itu aset. Jadi nanti kita masih perlu pertegas, perjelas statusnya biar di Pengadilan. Setelah itu kita tindak lanjuti perkara ini, seperti apa user kedepannya, ungkap Rizza.

Begitu juga Iskandar Laka, S.H., M.H. sebagai Penasehat Hukum (PH) Eko, menyampaikan kepada Arjunanusantaranews.com, bahwa ada tiga point perihal yang disampaikan pada hearing ini, yang pertama bawah Eko membeli tanah itu secara etikat baik dari ahli waris Soleh Hambali yaitu H. Kastain. Dibelakang di kemudian hari terjadi adanya tanah itu dianggap masalah karena masuk dalam pidana korupsi yang dianggap aset desa, itu diluar dari tanggung jawab pembeli (Eko).

Seharusnya itu tanggung jawab lurah juga penjual. Dan Eko ini dalam posisi sebagai korban. Hanya kita meminta keadilan lewat hearing di DPRD untuk memberi solusi terkait dengan status tanah itu. Apakah sebagai tanah aset desa atau tanah adat, seandainya surat-surat itu dilakukan kepala desa tidak sesuai mekanisme atau prosedur dalam mengeluarkan sporadik, itukan kekeliruan seorang pejabat atau seorang kepala desa, bukan kesalahan dari pembeli.

Yang kedua terkait dengan Kenapa kalau di anggap leter C yang dikeluarkan kepala desa itu Palsu, kenapa tidak sejak dari awal BPD maupun tokoh-tokoh masyarakat merasa surat tanah yang dikeluarkan itu palsu, mengapa mereka tidak protes. Atau mereka laporkan pemalsuan surat, karena yang di rugikan mereka, ungkapnya.



Yang ketiga terkait dengan klien kami melakukan upaya perdata. Jadi proses perdata itu terkait dengan status tanah. Seharusnya proses pidana itu juga berbarengan atau menunggu putusan dari perdata terkait status tanah itu. Tapi karena Jaksa menganggap ini pidana khusus atau tindak pidana korupsi maka dia melakukan proses sesuai prosedur. Dengan melihat proses perdata yang ada ini memerlukan waktu kurang lebih empat bulan, kita sudah mendapatkan putusan.

Putusan itu sendiri kita lihat, apakah dari pihak tergugat itu nanti ada upaya hukum. Sedangkan untuk pidananya jangka waktu mereka proses pidana itu hanya dibatasi tiga bulan.

Dan terkait proses pidana korupsi ranahnya di Kejaksaan endingnya mereka menunggu kepastian hukum dalam proses persidangan bahwa orang-orang yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang maupun turut serta diputus bersalah, sehingga bisa dilakukan upaya-upaya berikutnya seperti penyitaan terhadap aset.

Untuk perdata kita fokus kepada status tanah, bahwa itu aset desa atau tanah adat. Dengan dilakukan hearing ini sebenarnya kita hanya meminta kepada DPRD sebagai dewan yang mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat. Bahwa telah terjadi satu penjualan tanah yang di anggap aset desa. Padahal tanah itu sendiri dalam status tanah yang di keluarkan oleh kepala desa yang dikatakan adalah sebagai tanah adat.

Kami berharap pada hari ini output bisa mendapatkan kejelasan dari para pihak yang terlibat, pungkasnya.

Post Views: 105





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo Kawal Warga Sidokerto Kecamatan Buduran



bidik 45 menit ago

0 20 1 minute read



Ketua komisi A DPRD kabupaten Sidoarjo, H.Riza Ali Faizin M, Pdt kawal warga Sidokerto, dalam rapat sidang hearing terkait kasus tanah TKD desa Sidokerto kecamatan buduran,pada selasa 22/04/2025 (Foto: ist)

SIDOARJO, BIDIKNASIONAL.com – Acara rapat hearing pada selasa 22/04/2025 ,di ruang rapat paripurna DPRD kabupaten Sidoarjo, komisi A dibuka oleh ketua komisi A DPRD kabupaten Sidoarjo H. Riza Ali faizin M.Pdt. selanjutnya acara dijelaskan oleh Eko. Bahwasannya Eko sudah dua tahun dan sudah dikawling dijual kepada user tidak ada masalah, baru dua tahun kemudian muncul kasus kalau tanah tersebut dengan tanah merupakan tanah TKD.

Acara rapat hearing dihadiri juga Bambang riyoko,SE, Mohamed Rafi wibisono,Elak suciati ,SH Rizal Fuedy, SE. Hadir dari BPN kab Sidoarjo, dari Badan aset negara dan perwakilan warga desa Sidokerto.

Selanjutnya Iskandar Laka SH,MMH, kuasa hukum dari PT. Kembang Kenongo Properti, perumahan Griyo Sono Indah (GSI) menjelaskan bahwa eko membeli tanah sesuai dengan prosedur dengan dasar tanah tersebut beralaskan hak petok D atas nama Sholeh P.kambali, yang sudah meninggal sedangkan ada ahli warisnya Nustain sudah di tahan kejaksaan negeri sidoarjo bersama kepala desa sidokerto kecamatan Buduran. Dan dikuatkan oleh surat keterangan dari kepala desa bahwa tanah tersebut tidak bersengketa.

Selanjutnya disahkan oleh notaris dengan surat perjanjian ikatan jual beli (PUB).

Sementara itu, warga desa Sidokerto Hermanto yang mewakili warga Sidokerto menjelaskan tanah TKD desa Sidokerto sudah tidak berada di desa Sidokerto karena sudah di tular guling ke wilayah Tarik dan ke desa Banjar panji kecamatan Candi.

Andi Sulistiono TITP MSi, kabid administrasi pemerintahan dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa (DPMD) menjelaskan kalau tanah tersebut di duga merupakan tanah cuwilan. Kalau tanah cuwilan otomatis sewaktu – waktu bisa jadi tanah kas desa atau aset pemerintah.tapi kepala desa Sidokerto Ali nasihin, dalam hal ini memanfaatkan kesempatan untuk di jual untuk mengambil keuntungan, „pungkasnya.Ketua Komisi A menghimbau kepada masyarakat sidogarjo agar berhati – hati kalau membeli tanah harus diteliti dulu surat – suratnya.

Laporan: yah

Editor: Budi Santoso





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Jatim

Hearing Komisi A DPRD, Terungkap Fakta Proses Jual Beli Tanah di Desa Sidokerto, Buduran

Iswin Amzal - Rabu, 23 April 2025 | 06:25 WIB



Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo H. Rizza Ali Faldin M.Pd.I (Foto : Win)



Sidoarjo, Cakrawala.co – Komisi A, DPRD Sidoarjo menggelar agenda hearing di ruang rapat paripurna bersama Direktur PT. Kembang Kenongo, Eko. Yang memiliki usaha jual beli perumahan di Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Selasa 22 April 2025.

Ketua komisi A DPRD kabupaten Sidoarjo H. Rizza Ali faizin M.Pdi memimpin rapat hearing, juga didampingi anggota komisi A, seperti Bambang riyoko.SE, Mohamad Rafi wibisono, Elok suciati, Rizal Fuady, SE.

Hadir juga perwakilan dari Kantor Pertanahan kabupaten Sidoarjo, Badan aset negara, PMD, Camat Buduran dan perwakilan warga desa Sidokerto.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Terkait dengan nasib lima puluh dua user, tetap kita menunggu karena belum keputusan Pengadilan. Jadi nanti setelah putusan pengadilan baru kita pikirkan bersama. Karena kita ngawal kasus ini, dan ini baru diketahui semua dokumen-dokumen tadi tidak ada yang menyertakan bahwa itu aset. Jadi nanti kita masih perlu pertegas, perjelas statusnya biar di Pengadilan. Setelah itu kita tindak lanjuti perkara ini, seperti apa user kedepannya, ungkap Rizza.

Begitu juga Iskandar Laka, S.H., M.H. sebagai Penasehat Hukum (PH) Eko, menyampaikan kepada Arjunanusantaranews.com, bahwa ada tiga point perihal yang disampaikan pada hearing ini, yang pertama bawah Eko membeli tanah itu secara etikat baik dari ahli waris Soleh Hambali yaitu H. Kastain. Dibelakang di kemudian hari terjadi adanya tanah itu dianggap masalah karena masuk dalam pidana korupsi yang dianggap aset desa, itu diluar dari tanggung jawab pembeli (Eko).

Seharusnya itu tanggung jawab lurah juga penjual. Dan Eko ini dalam posisi sebagai korban. Hanya kita meminta keadilan lewat hearing di DPRD untuk memberi solusi terkait dengan status tanah itu. Apakah sebagai tanah aset desa atau tanah adat, seandainya surat-surat itu dilakukan kepala desa tidak sesuai mekanisme atau prosedur dalam mengeluarkan sporadik, itukan kekeliruan seorang pejabat atau seorang kepala desa, bukan kesalahan dari pembeli.

Yang kedua terkait dengan Kenapa kalau di anggap leter C yang dikeluarkan kepala desa itu Palsu, kenapa tidak sejak dari awal BPD maupun tokoh-tokoh masyarakat merasa surat tanah yang dikeluarkan itu palsu, mengapa mereka tidak protes. Atau mereka laporkan pemalsuan surat, karena yang di rugikan mereka, ungkapnya.



Yang ketiga terkait dengan klien kami melakukan upaya perdata. Jadi proses perdata itu terkait dengan status tanah. Seharusnya proses pidana itu juga berbarengan atau menunggu putusan dari perdata terkait status tanah itu. Tapi karena Jaksa menganggap ini pidana khusus atau tindak pidana korupsi maka dia melakukan proses sesuai prosedur. Dengan melihat proses perdata yang ada ini memerlukan waktu kurang lebih empat bulan, kita sudah mendapatkan putusan.

Putusan itu sendiri kita lihat, apakah dari pihak tergugat itu nanti ada upaya hukum. Sedangkan untuk pidananya jangka waktu mereka proses pidana itu hanya dibatasi tiga bulan.

Dan terkait proses pidana korupsi ranahnya di Kejaksaan endingnya mereka menunggu kepastian hukum dalam proses persidangan bahwa orang-orang yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang maupun turut serta diputus bersalah, sehingga bisa dilakukan upaya-upaya berikutnya seperti penyitaan terhadap aset.

Untuk perdata kita fokus kepada status tanah, bahwa itu aset desa atau tanah adat. Dengan dilakukan hearing ini sebenarnya kita hanya meminta kepada DPRD sebagai dewan yang mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat. Bahwa telah terjadi satu penjualan tanah yang di anggap aset desa. Padahal tanah itu sendiri dalam status tanah yang di keluarkan oleh kepala desa yang dikatakan adalah sebagai tanah adat.

Kami berharap pada hari ini output bisa mendapatkan kejelasan dari para pihak yang terlibat, pungkasnya.

Post Views: 105



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sekretaris desa Sidokerto Hermanto yang mewakili warga Sidokerto menjelaskan tanah TKD desa Sidokerto sudah tidak berada di desa Sidokerto karena sudah di tukar guling ke wilayah Tarik dan ke desa Banjar panji kecamatan Candi.

Andi Sulistiono TTTP MSI, kabid administrasi pemeritahan dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa (DPMD) menjelaskan kalau tanah tersebut diduga merupakan tanah cuwilan.

Kalau tanah cuwilan otomatis sewaktu-waktu bisa jadi tanah kas desa atau aset pemerintah. Tapi kepala desa Sidokerto Ali nasihin, dalam hal ini memanfaatkan kesempatan untuk di jual untuk mengambil keuntungan, pungkasnya.

